



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSHARTO HUNTOYUNGO
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 218333

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.752.000.000**

1. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 382 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 452 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 52.000.000
8. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH
TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **202.000.000**



1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 20.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.948.018

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.160.948.018

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.160.948.018

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.